



Sistem Politik di Lebanon dan Implikasinya terhadap Politik Dalam dan Luar Negeri Lebanon

Laila Rizky Amaliya

Universitas Indonesia, Indonesia; laila.rizky31@ui.ac.id

Mulawarman Hannase

Universitas Indonesia, Indonesia; mulawarmanhannase@ui.ac.id

Nashiha Ulya

Universitas Indonesia, Indonesia; nashiha.ulya@ui.ac.id

Khoirunnisa

Universitas Indonesia, Indonesia; khoirunnisa31@ui.ac.id

Tobroni Muhammad

Universitas Indonesia, Indonesia; tobronimoh24@gmail.com

| Dikirim: 07-02-2025

| Diterima: 22-05-2025

| Dipublikasikan: 30-08-2025

Keywords

Lebanon, National Interests, Politics, Political Institution, Sectarian

ABSTRACT

Sectarian politics in Lebanon has played a pivotal role in shaping and developing the country's political system, as reflected in the power-sharing arrangement based on religious and ethnic identities. This study aims to analyze the impact of sectarianism on Lebanon's national interests, highlighting how the sectarian-based political system influences internal stability and the country's foreign relations. Utilizing theories of sectarianism and national interest, this research examines how the power distribution along religious denominations (Maronite, Sunni, Shia, and others) affects domestic policymaking and Lebanon's foreign policy strategies. The findings indicate that while the sectarian system allows for political inclusivity, it also generates inter-group tensions, exacerbating the nation's political and social instability. Furthermore, external interventions by actors such as Saudi Arabia and Iran have intensified domestic political rivalries, compounding their adverse effects on Lebanon's national interests. Thus, Lebanon's sectarian political system not only impacts domestic policies but also shapes increasingly complex regional and international political dynamics.

Kata Kunci

Institusi Politik, Kepentingan Nasional, Lebanon, Politik, Sektarianisme

ABSTRAK

Politik sektarianisme di Lebanon telah menjadi faktor penting dalam pembentukan dan perkembangan sistem politik negara ini, yang tercermin dalam pembagian kekuasaan berdasarkan identitas agama dan etnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sektarianisme terhadap kepentingan nasional Lebanon, dengan menyoroti bagaimana sistem politik Lebanon yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sektarian mempengaruhi stabilitas internal dan hubungan luar negeri negara tersebut. Dalam kajian ini, menggunakan teori sektarianisme dan kepentingan nasional untuk memahami bagaimana pembagian kekuasaan yang didasarkan pada denominasi agama (Maronit, Sunni, Syi'ah, dan lainnya) mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam negeri serta strategi luar negeri Lebanon. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sektarian memberi ruang bagi inklusivitas politik, ia juga menciptakan ketegangan antar kelompok, yang pada gilirannya memperburuk stabilitas politik dan sosial negara. Selain itu, intervensi aktor eksternal, seperti Saudi Arabia dan Iran, memperburuk persaingan politik domestik dan memperburuk dampaknya terhadap kepentingan nasional Lebanon. Dengan demikian, sistem politik sektarian di Lebanon tidak hanya berimplikasi pada kebijakan domestik, tetapi juga membentuk dinamika politik regional dan internasional yang semakin kompleks.

PENDAHULUAN

Politik sektarianisme telah menjadi ciri khas dari sistem politik Lebanon sejak negara tersebut meraih kemerdekaannya pada tahun 1943. Politik sektarianisme ini lahir dari sistem demokrasi konsosiasional yang diterapkan di Lebanon. Sistem demokrasi konsosiasional ini merupakan basis konstitusi utama yang menggerakkan jalannya pemerintahan Lebanon. Demokrasi konsosiasional sendiri merupakan sebuah strategi demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan iklim negara yang stabil dan damai dalam masyarakat yang didalamnya terdapat beragam etnis, nasionalisme maupun sektarianisme dengan mengalokasikan kekuasaan politik secara proporsional berdasarkan demografi agama dan sekte serta menyediakan posisi kunci pemerintahan untuk perwakilan dari setiap komunitas yang berbeda. Demokrasi ini juga merupakan sarana untuk melindungi kelompok minoritas yang dikecualikan dari kekuatan politik berdasarkan identitas askriptif agar terhindar dari adanya fragmentasi politik. Hal ini dilakukan dengan memunculkan koalisi besar, otonomi budaya, asas proposionalitas, serta veto minoritas (Baumann, 2024).

Dalam pemerintahan Lebanon, demokrasi konsosiasional menjadi payung utama dalam mengakomodasikan kepentingan masyarakat Lebanon yang majemuk serta sebagai sarana dalam mengejawatahkan sistem politik sektarianisme yang pembagian kekuasaannya didasari pada golongan-golongan agama maupun sekte tertentu (Salloukh, 2024; Vaughan, 2018). Implementasi sistem pembagian kekuasaan yang didasarkan pada kesepakatan sektarian dan konsosiasionalisme ini menghendaki pembagian jabatan-jabatan politik utama berdasarkan agama dan sekte sehingga identitas Lebanon tidak memiliki kejelasan karena setiap individu hanya mendefinisikan diri mereka dengan identitas agama/etnis mereka sebelum identitas nasional. Sistem yang juga dikenal sebagai sistem *power-sharing* ini, pada awalnya dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kelompok-kelompok agama dan etnis yang beragam di Lebanon, dengan tujuan menjaga kestabilan dan mencegah dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya (Ekip, 2021).

Namun, meskipun memiliki tujuan tersebut, pembagian kekuasaan sektarian ini seringkali justru memperburuk ketegangan antar kelompok, yang pada gilirannya dapat mengancam persatuan nasional dan memperburuk krisis politik yang sudah ada. Ketegangan sektarian ini tidak hanya membatasi proses pengambilan keputusan yang efektif, tetapi juga memperburuk polarisasi sosial di kalangan masyarakat Lebanon. Salah satu contoh nyata dari dampak negatif sistem politik sektarianisme adalah ketidakmampuan pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial-ekonomi, yang semakin diperburuk dengan ketegangan politik yang timbul akibat ketidaksetaraan antar kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam sistem sektarianisme yang berperan dalam membentuk dinamika politik Lebanon serta pengaruhnya terhadap kebijakan nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan lebih mendalam bagaimana ketegangan sektarian yang terjadi akibat sistem politik ini dapat mempengaruhi stabilitas politik Lebanon, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap upaya-upaya rekonsiliasi sosial dan politik (Salamey, 2014).

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak sektarianisme terhadap kepentingan nasional Lebanon, dengan menyoroti bagaimana sistem politik Lebanon melalui partai-partainya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sektarian mempengaruhi stabilitas internal dan hubungan luar negeri negara tersebut. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan teori politik sektarianisme dan kepentingan nasional untuk memahami bagaimana pembagian kekuasaan yang didasarkan pada denominasi agama mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam negeri serta strategi luar negeri Lebanon. Dengan menggunakan data yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dari politik sektarian terhadap dinamika politik Lebanon, dan mengidentifikasi solusi-solusi yang mungkin untuk menciptakan kestabilan yang lebih besar di negara ini. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, peneliti merumuskan dua pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam artikel ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sistem politik sektarianisme di Lebanon? dan 2) Apa implikasi sistem politik sektarianisme di Lebanon?

Sistem politik di Lebanon merupakan sistem politik yang unik yang menekankan pada aspek multisekte dan agama. Pada mulanya, sistem politik sektarianisme di Lebanon menjadi sebuah solusi utama dalam meminimalisasi perpecahan sektarianisme. Namun, dalam penelitian “*In Defense of Intra-Sectarian Divide: Street Mobilization, Coalition Formation, and Rapid Realignment of Sectarian Boundaries in Lebanon*” yang dikaji oleh Rani Majed menjelaskan bahwa sistem sektarianisme memicu adanya perpecahan dalam pemerintahan (Majed, 2021). Perpecahan ini muncul akibat tumbuhnya berbagai partai politik di Lebanon sehingga terjadinya tumpang tindih pada proses penyelarasan dengan komunitas sektarian. Hal ini menjadikan adanya *mutual substitution* antara politik dan sektarian. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persatuan intra sektarian politik membentuk proses sektarianisme dan polarisasi dibanding pembagian inter-sektarian. Hal ini dipertentangkan oleh Baytiyeh (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Lebanon’s Power-Sharing System and the Rise of Sectarianism*”.

Baytiyeh menyatakan bahwa sistem politik sektarianisme bukan menjadi sistem yang hanya berdampak pada perpecahan melainkan ada berbagai hal positif lainnya yang juga mesti dikaji dari sistem tersebut. Menurut penelitian ini, pemerintahan Lebanon yang dibangun berdasarkan sistem politik sektarianisme memang dapat membuka kesempatan untuk terealisasinya perdamaian, mendukung dan menjaga keseimbangan sektarian, serta mencegah dominasi satu sekte sehingga menghasilkan stabilisasi nasional di Lebanon. Namun, sistem ini juga dapat menyebabkan instabilitas politik dan melemahkan persatuan negara Lebanon, yang diakibatkan oleh manipulasi para elit politik sektarianisme yang telah menodai dasar-dasar pemerintahan *power-sharing* dan melakukan misinterpretasi terhadap fungsinya. Elit politik sektarianisme yang berkuasa di Lebanon menggunakan sektarianisme sebagai instrumen dalam menguatkan posisinya di Lebanon. Banyak dari kalangan penguasa yang memanipulasi sistem tersebut untuk mendapatkan dukungan besar dari rakyat (Baytiyeh, 2019).

Namun, kedua sumber tersebut hanya berfokus meninjau politik dalam negeri Lebanon. Melihat adanya politik sektarianisme di Lebanon dan adanya dampak geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi hal yang krusial dalam melihat dan mengkaji Lebanon dari perspektif politik dan kebijakan luar negeri. Politik sektarianisme di Lebanon bukan hanya mengakibatkan dampak yang signifikan dalam negeri Lebanon sendiri melainkan juga berdampak pada taraf regional maupun internasional. Alhasil, penelitian ini juga akan mengembangkan dan mengkaji lebih lanjut mengenai dampaknya secara internasional serta melihat kepentingan dan posisi Lebanon di taraf regional maupun internasional.

KERANGKA KONSEPTUAL

Politik Sektarianisme

Sistem politik sektarianisme merupakan *power-sharing system* dalam pemerintahan berdasarkan kelompok agama maupun sekte. Sistem ini bertujuan agar adanya keseimbangan dalam kekuasaan. Sistem politik ini merupakan sistem yang mencegah adanya dominasi agama maupun sekte yang satu dengan yang lainnya sehingga hal ini dapat melindungi pemerintahan dari adanya konflik antar golongan yang berbeda. Sistem politik sektarianisme ini memberikan hak pada golongan-golongan dalam pemerintahan untuk mengakomodasi dan mewakili kepentingan golongannya. Sistem ini memperbolehkan setiap golongan memonitor dan mengawasi satu sama lainnya dan adanya kekuatan hak veto atas kelompok tersebut apabila adanya inefektivitas dalam pemerintahan. Hal ini demi menjaga dan melindungi iklim politik yang kondusif di Lebanon (Baytiyeh, 2019).

Sistem politik sektarianisme ini umumnya diterapkan dalam sebuah negara yang memiliki tipologi yang di dalamnya terdapat sekte maupun agama yang beragam dan dominasi dan kekuatan antar golongan-golongan tersebut kuat sehingga sistem ini menjadi payung dalam mencegah friksi antar

golongan. Sistem ini menjadi salah satu sistem politik yang berupaya menjaga keseimbangan dan mencegah adanya marginalisasi sekte maupun agama tertentu dalam suatu pemerintahan. Pembagian kekuasaan dalam sistem politik sektarianisme ini mengupayakan sebuah pembagian dimana komponen-komponen dalam pemerintahan tertentu, seperti presiden, perdana menteri, maupun dewan perwakilan dan menteri dibagi secara proposional berdasarkan golongan-golongan tertentu dalam negara. Pembagian kekuasaan dalam sistem ini disebut sebagai sistem konstitusi konsosiasional, dimana sistem ini mendistribusikan kekuatan di pemerintahan sesuai dengan sektarian yang ada di suatu negara. Teori sistem politik sektarianisme sangat krusial dalam menyoroti dan menilik sistem pemerintahan di Lebanon. Lebanon merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem politik sektarianisme yang membagi kekuasaan berdasarkan sekte-sekte dominan sehingga teori ini dapat membedah struktur dominasi sektarian dalam dinamika politik di Lebanon (Emery & Spruk, 2024).

Konsep Kepentingan Nasional

Implikasi akibat adanya sistem politik sektarianisme menjadikan hal tersebut penting dalam membaca politik luar negeri Lebanon serta kepentingan nasionalnya dalam taraf regional dan internasional. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau ini memuat arti berbagai macam hal yang secara logika didasari oleh kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*). Konsep ini sebagai sarana dalam mendorong tindakan politik internasional yang ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri serta diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dalam mengarahkan para pembuat kebijakan luar negeri suatu negara serta merupakan unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menerapkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerja sama atau konflik. Penelitian ini ingin menjelaskan identitas dan juga kepentingan-kepentingan yang dilindungi dan dipertahankan oleh aktor di Lebanon. Lebih dalam lagi, melihat dari budaya politik sektarianisme, maka identitas nasional Lebanon sulit untuk diidentifikasi, sebab masing-masing sekte memperjuangkan kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, pendekatan ini akan mengidentifikasi implikasi dari budaya politik sektarianisme terhadap kepentingan nasional dari masing-masing koalisi partai politik yang terdapat di dalam tubuh Lebanon (Rusdiyanta, 2022).

METODE RISET

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode penelitian post-positivisme dan sebagian besar induktif, dengan peneliti menghasilkan makna dari data yang dikumpulkan di lapangan. Penelitian kualitatif adalah metode yang diawali dengan membangun asumsi dan kemudian menggunakan kerangka teoritis dalam studi atau penelitian yang berhubungan dengan fenomena. Metode kualitatif berfokus pada interpretasi materi naturalistik yang dapat menjadi alat dalam memahami perspektif yang berbeda dalam masyarakat (Creswell, 2023). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi sistem politik sektarianisme di Lebanon dan dampaknya terhadap dinamika politik di negara tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena keunggulannya dalam mempelajari fenomena sosial dan proses yang melatarbelakangi, mengingat sifatnya yang interpretatif yang memungkinkan peneliti untuk mendalami makna tindakan sosial secara mendalam. Hal ini sangat relevan dalam memahami pembentukan sistem politik sektarianisme di Lebanon.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, laporan, dan artikel jurnal yang relevan. Sumber-sumber utama mencakup publikasi akademik dari American University of Beirut, laporan kebijakan dari Kementerian Keuangan Lebanon, serta artikel yang diterbitkan di jurnal bereputasi seperti *Journal of International Affairs*, *Istituto Affari Internazionali (IAI)*, *International*

Journal of Middle East Studies dan lembaga penelitian yang berfokus pada studi Timur Tengah. Semua sumber digunakan untuk memastikan keakuratan dan kedalaman analisis dalam membahas sistem politik di Lebanon. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga mengevaluasi dan menginterpretasi informasi yang ada untuk menyusun kesimpulan yang lebih dalam mengenai implikasi sistem politik sektarianisme di Lebanon. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang sistem politik sektarianisme di Lebanon dan dampaknya terhadap dinamika politik di negara tersebut (Bakry U.S., 2016.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Politik di Lebanon: Menyoroti Sektarianisme dalam Dinamika Pemerintahan di Lebanon

Lebanon merupakan salah satu negara Arab yang didiami oleh beragam sekte maupun agama. Dominasi dan kekuatan antar sekte dan agama ini sangat kuat sehingga hal ini berpengaruh terhadap dinamika dan sistem politik yang diterapkan di Lebanon. Sejak berdirinya Lebanon Raya pada 1920 di bawah mandat Perancis, hubungan antara agama dan politik serta kekuatan antar sekte di Lebanon telah menjadi realitas hubungan yang sangat kompleks. Meski Lebanon memiliki kekuatan politik Islam yang solid, kekuatan politik Islam ini terpecah dalam beberapa kelompok, yaitu Sunni dan Syiah (Druze dan Alawiyah). Adapula sekte Kristen yang juga merupakan sekte yang terpecah menjadi beberapa unit, seperti Maronit, Romawi Orthodox, Romawi Katolik, Armenia Orthodox, Armenia Katolik, Evangelis Latin, Orthodox Yunani dan Katolik Yunani, Orthodox Suriah, Katolik Suriah, Evangelis, dan Koptik. Selain itu, Lebanon juga memiliki komunitas agama Yahudi sebagai salah satu komunitas minoritas. Keberagaman kelompok dan golongan yang cukup tinggi di Lebanon, mendorong negara tersebut memberlakukan sistem politik yang dapat memayungi dan mengakomodasi berbagai golongan dan kelompok sekte secara khususnya (Salamey, 2014).

Sistem politik yang diberlakukan di Lebanon merupakan sistem politik sektarianisme yang mendorong partisipasi semua golongan sekte dan agama. Posisi-posisi penting dalam pemerintahan dialokasikan sesuai dengan distribusi etnis dan agama yang proposional. Diberlakukannya sistem politik sektarianisme ini didasari pada pasal 7 dan 9 Konstitusi Lebanon yang mengakui bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama serta menjamin penghargaan terhadap status hukum personal dan kepentingan agama. Secara konstitusional, sistem politik sektarianisme juga merupakan sebuah warisan sejarah institusi Lebanon. Setelah perang saudara yang berkepanjangan pada 1975–1990 di Lebanon, perpecahan pemerintahan ini mengakibatkan Lebanon menerapkan sistem pembagian kekuasaan serta menghadirkan demokrasi konsosiasionalisme yang berbasis parlementer (Mazzucotelli, 2020).

Politik sektarianisme meluas hingga ke pembentukan UU kewarganegaraan dan status pribadi. Di Lebanon, warga negara dikenal oleh negara melalui kacamata sekte mereka. Masalah warisan, perkawinan, dan perceraian diselesaikan melalui lima belas undang-undang status pribadi yang ditetapkan untuk delapan belas sekte. Oleh karena itu, politik sektarian Lebanon bukan hanya sebuah proyek elitis para pemangku kekuasaan. Namun, sistem ini direproduksi melalui aparat birokrasi lembaga-lembaga negara sebagai struktur publik dan sektarian yang bersifat ko-konstitutif. Sekte-sekte ini terlibat dalam wacana dan praktik negara Lebanon modern (Andersen, 2022). Secara pembagian kekuasaan, sistem politik sektarianisme di Lebanon ini mengupayakan sebuah pembagian kekuasaan yang menyangkut presiden, perdana menteri, maupun dewan perwakilan dan menteri yang dibagi secara proposional berdasarkan sektarianisme. Pembagian kekuasaan ini dapat disebut sebagai sistem konstitusi konsosiasional. Pembagian kekuasaan di pemerintah Lebanon juga didasari oleh kesepakatan Pakta Nasional atau dapat disebut sebagai Al-Mitsaq Al-Wathani. Pakta nasional ini merupakan pakta

yang disetujui oleh seluruh komponen pemerintahan Lebanon ini dan menjadi dasar-dasar utama fondasi negara Lebanon (Mazzucotelli, 2020).

Pakta ini berperan penting dalam dasar penyusunan konstitusi, menentukan garis dan arah haluan negara, serta yang paling krusial yakni memberikan saluran demokrasi terhadap komunitas sektarianisme di Lebanon. Pakta nasional juga secara tidak langsung berperan penting dalam mendistribusikan kekuasaan dalam berbagai sekte maupun agama sehingga dapat menghasilkan formula *power-sharing* yang solid dan mapan. Mode pemerintahan dan mobilisasi politik di Lebanon yang berfokus pada afiliasi sektarian menjadikan sekte sebagai salah satu agen utama dalam meraih kekuasaan politik di Lebanon serta memenuhi kepentingan kelompok dan golongan sekte tertentu (Salamey, 2014).

Power-sharing system di Lebanon dibuktikan dengan adanya distribusi kekuasaan di Lebanon, dimana posisi Presiden sebagai kepala dan simbol negara dikuasai oleh Kristen Maronit, Perdana Menteri yang mengemban tanggung jawab eksekutif dan menjadi kepala pemerintahan berasal dari Muslim Sunni, dan Ketua Parlemen (*Speaker*) yang memiliki fungsi legislatif dan bertanggung jawab terhadap Perdana Menteri diketuai oleh Muslim Syiah. Adapun Dewan Menteri, yang fungsinya menjamin pelaksanaan undang-undang, mengusulkan rancangan undang-undang, membubarkan parlemen, mengerahkan tentara, dan meratifikasi perjanjian internasional juga merupakan perwakilan-perwakilan dari komunitas sektarian tertentu. Dewan Menteri ini dibagi berdasarkan pembagian kekuasaan yang bersifat konfensionalis. Adanya konstitusi yang berfokus pada konteks sektarianisme berpengaruh pula terhadap sistem pemerintahan yang diusung Lebanon. Lebanon mengusung sistem yang bercorak demokrasi-parlementer yang konsosionalis yang berpengaruh terhadap komposisi dan sistem parlemen di Lebanon. Parlemen memegang kekuatan di pemerintah dan kursi parlemen dialokasikan berdasarkan haluan sektarian, sehingga sebagian besar parlemen dibentuk berdasarkan afiliasi sektarian dan kepentingan politik sekte-sekte tersebut (Ghosn & Parkinson, 2019).

Ketiga lembaga utama pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersebut juga berfokus pada pembagian sektarian. Pola-pola sektarianisme dalam lembaga pemerintahan berperan penting dalam menentukan jalannya negara dan pemerintahan serta sebagai fondasi dalam melihat arah dan kebijakan politik di Lebanon. Adanya aksesibilitas yang tidak terbatas dalam pemerintahan terhadap berbagai komunitas sektarian menjadikan identitas golongan sektarianisme semakin menguat di pemerintahan. Di samping itu, asas keseimbangan antar golongan dalam pemerintahan Lebanon mendorong semua kelompok dan golongan sektarianisme memiliki suara dan peran dalam pemerintahan sehingga hal ini membawa pada ciri khas pemerintahan Lebanon yang menekankan pada kepentingan multisekte. Meski sistem pemerintahan di Lebanon telah memiliki payung dan konstitusi dalam menjamin hak-hak dan partisipasi kelompok sektarian secara luas, friksi dan perbedaan kepentingan masih bermunculan dan berdampak pada stabilitas negara. Friksi dan perbedaan terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan setiap aliran sektarianisme yang berbeda. Hal ini juga diakibatkan adanya persaingan kekuasaan di antara kelompok dan aliran sektarianisme dalam pemerintahan. Masing-masing elit politik di berbagai aliran sektarianisme ingin meraih kekuasaan dalam politik dan pemerintahan (Salamey, 2014).

Selain itu, sistem elektoral juga menjadi bagian dari pengejawantahan sistem politik sektarianisme di Lebanon. Sistem elektoral merupakan unsur terpenting dalam menyoroti sistem demokrasi-parlementer yang bercorak sektarianisme di Lebanon. Sistem pemilu Lebanon adalah sistem pemungutan suara blok mayoritas, sistem *first-past-the-post*, yang mana para pemilih memilih kandidat sebanyak-banyaknya karena adanya alokasi kursi sekte di distrik mereka. Pada prinsipnya, sistem ini dirancang untuk meminimalkan kompetisi antar agama dan memaksimalkan kerja sama lintas agama. Adanya sistem elektoral yang mewujudkan kompromi antar elite agama dalam berpolitik dapat berjalan beringan serta dapat memenuhi kepentingan masing-masing sekte. Saluran-saluran dalam politik yang cukup mapan di Lebanon dalam mengakomodasi perbedaan sektarian yang kuat menjadikan hal ini

sebagai kendaraan dalam menerapkan demokrasi kepada berbagai golongan. Pada dasarnya, sistem pemilu sektarian di Lebanon ini didasari pada dasar-dasar yang ditetapkan dalam Pakta Nasional. Namun, aturan mengenai pemilu sektarianisme ini mengalami perubahan dan diperbarui dalam Perjanjian Taef tahun 1989. Perjanjian Taef (Taef Accord) difungsikan untuk mengakomodasi, meredakan konflik laten antar kelompok sektarian yang berbasis militan serta berperan penting dalam memaksimalkan demokrasi sektarian di Lebanon (Salamey, 2014).

Sistem elektoral di Lebanon juga meletakkan dasar sektarianisme dalam sistem pemungutan suaranya. Pemungutan suara atau disebut sebagai *al-aklam* juga menjadi salah satu sistem yang berafiliasi dengan unsur-unsur sektarianisme. Pada sistem pemungutan suara, tempat pemungutan suara para calon pemilih dipisah sesuai dengan sekte-sekte tertentu. Sistem elektoral ini juga mendukung adanya sistem pemilihan daerah multi-anggota yang dibentuk untuk mengalokasikan jumlah kursi tertentu untuk setiap sektarian. Praktik pemilihan dewan perwakilan daerah berdasarkan sektarianisme tersebut telah menjamin aksesibilitas kekuasaan elit sektarian dan partai di pemerintahan (Arās, 2024).

Dalam konteks parlemen misalnya, sejak tahun 1992, kursi parlemen telah dibagi di antara enam distrik administratif dan dibagi lagi menjadi distrik-district elektoral yang kecil sehingga hal ini menambah jumlah distrik setiap tahunnya. Penerapan undang-undang “Qada” pada tahun 1960 beserta Perjanjian Doha (Doha Accord) yang diaplikasikan pada tahun 2009 mengakibatkan distrik pemilihan bertambah cukup pesat menjadi 26 unit. Hal ini mengakibatkan adanya jaminan keterwakilan sektarian yang lebih kuat di pemerintahan. Namun, pada bulan Mei 2018, pemilihan parlemen akhirnya diselenggarakan di bawah naungan undang-undang pemilu yang baru. Disahkan pada musim panas 2017, undang-undang pemilu yang baru ini mengurangi jumlah distrik di Lebanon, memperkenalkan representasi proporsional (*proportional representative*), dan berupaya untuk mendorong keseimbangan lintas sekte melalui penerapan sistem pemungutan suara preferensial (Andersen, 2022).

Pemilu 2018 dengan undang-undang baru ini menyebabkan perubahan politik yang moderat di parlemen. Perubahan ini berpengaruh terhadap dinamika politik di Lebanon. Secara komprehensif, kursi di parlemen didistribusikan secara konfesional tetapi dipilih melalui hak pilih universal. Setiap kelompok sektarian mempunyai kuota kursi parlemen. Namun, para kandidat anggota parlemen dipilih oleh konstituen yang sepenuhnya beragama. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan persaingan antar-sektarian dan memaksimalkan kerja sama lintas sekte. Di daerah-daerah dengan tingkat campuran yang tinggi, para kandidat mencari dukungan dari berbagai kelompok sektarian yang dapat mempengaruhi hasil pemilu agar mereka lebih menguntungkan kelompok-kelompok yang bersaing. Karena kemungkinan besar keuntungan pemilu di daerah-daerah sudah ditentukan sebelumnya, berdasarkan komposisi sektarian, praktik persekongkolan sangat banyak diterapkan dalam tawar-menawar kekuasaan elit sektarian. Sejak era Chamoun, penarikan daerah telah dimanipulasi untuk memberikan keuntungan bagi kelompok politik atau sektarian (Andersen, 2022).

Sistem pemilu merupakan salah satu mekanisme kelembagaan yang digunakan oleh Lebanon untuk melestarikan sifat klientelistik dari sistem pengakuan agama dan untuk menetralkan upaya-upaya untuk menjauh dari politik berbasis sektarian. Politik sektarianisme juga ditemukan melalui sistem kepartaian dan partai politik di Lebanon. Secara tipologis, Lebanon memiliki polaritas sektarian yang kuat dan sistem elektoral mayoritas yang moderat sehingga hal ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap sistem kepartaian di negara tersebut. Akibatnya, sistem partai di Lebanon menganut sistem multi-partai dengan mencakup aspek kader yang berbasis sektarian dan partai politik massa. Adapun partai-partai sektarianisme di Lebanon adalah sebagai berikut; partai mayoritas Sunni; Gerakan Masa Depan, partai Syiah; Hizbullah dan Amal partai Kristen Maronit; Gerakan Patriotik Bebas dan Pasukan Lebanon, dan Partai Phalange dan partai Druze, serta Partai Sosialis Progresif. Sebagian besar partai sektarian ini bersifat *personality-based*, yang terdiri dari para pengikut pemimpin politik atau panglima perang yang berkharisma saat ini atau di masa lalu. Kepemimpinan partai politik yang bersifat personal sering kali

menyebabkan terbentuknya partai-partai yang dikelola oleh sebuah keluarga dan meluasnya suksesi kekerabatan dalam kepemimpinan (Salamey, 2014).

Hal ini berpengaruh terhadap luasnya populisme sektarian di Lebanon. Populisme sektarian Lebanon berfungsi sebagai sarana untuk aspirasi kelompok sekte tertentu. Populisme ini menjamin adanya penguatan masing-masing komunitas sekte dalam perebutan kekuasaan, dan telah membangun pengawasan dan keseimbangan komunal yang kuat terhadap munculnya otoritas negara yang sangat dominan. Oleh karena itu, politik sektarian dalam matriks sistem pemilu dan partai di Lebanon, serta kehadiran kepemimpinan politik yang punya personalitas yang kuat, telah berhasil memperkuat masyarakat sektarian untuk menghancurkan pola perilaku politik yang dominan. Karakter sektarianisme atau komunal Lebanon menjadikan adanya hubungan yang khas antara partai dan negara. Sikap partai politik terhadap negara umumnya bersifat kontradiktif, tergantung pada kapasitas mereka untuk memegang sumber daya dalam negara. Oleh karena itu, ketika mereka memiliki kapasitas untuk menempatkan sumber daya negara di bawah kendali mereka, mereka bersikap positif terhadap negara, Namun, jika mereka tidak memiliki kendali atau manfaat yang memuaskan, maka hal tersebut akan melemahkan legitimasi negara sampai pada tingkat penuaan yang sering kali menyebabkan kehancuran total negara tersebut (Mazzucotelli, 2020).

Namun dalam kedua kasus tersebut, negara pada akhirnya merupakan institusi yang berada di bawah legitimasi utama para pemimpin populis dan partai sektarian mereka. Partai-partai politik di Lebanon, khususnya partai sektarianisme telah menggunakan berbagai taktik untuk memperkuat posisi kekuasaan mereka dan memaksimalkan kekuatan sumber dayanya. Namun, hal ini mengharuskan partai-partai populis sektarian ini menampilkan mereka sebagai satu-satunya perwakilan dari masing-masing komunitas sektarian. Hal ini sering kali menimbulkan adanya rivalitas intra-sektarian antara partai politik sesama sekte yang ingin menguatkan pengaruhnya di pemerintahan. Secara sistemik, mobilisasi partai politik komunal bergantung pada beragam insentif seperti indoktrinasi secara ideologi, rekrutmen pasukan, pekerjaan publik dan pelayanan, dukungan sosial, insentif ekonomi, pembelian suara dan lainnya. Hasilnya adalah adanya kecenderungan membangun infrastruktur komunal sektarianisme yang otonomi yang secara berkelanjutan berasosiasi dengan hubungan patronase yang bersifat nepotisme antara anggota komunitas sektarian dan pemimpin populis (Emery & Spruk, 2024).

Selain itu, sistem partai di Lebanon memiliki ciri khas tersendiri yakni diimplementasikannya sistem keterbukaan dalam anggaran dan sumber dana praktis partai. Adanya sistem terbuka pada pengoperasian partai politik di Lebanon menyebabkan partai-partai ini diperbolehkan untuk menerima dana partai secara tidak terbatas, baik dari *stakeholder* domestik maupun luar negeri. Seperti pada partai Syiah, Hizbullah, menerima bantuan besar dari Iran, terutama bantuan secara militer dan alat persenjataan. Iran menjadi sekutu terdekat Hizbullah di kawasan Timur Tengah dan berpengaruh cukup kuat dalam menguatkan basis Hizbullah di Lebanon Selatan. Partai politik di Lebanon juga memiliki ciri khas tersendiri. Partai-partai politik, khususnya yang berafiliasi sektarianisme, dapat diperbolehkan untuk membangun organ militer dalam rangka menguatkan pertahanannya di pemerintahan (Andersen, 2022).

Hizbullah misalnya, salah satu partai Syiah Lebanon yang bukan hanya berpartisipasi dalam ranah politik praktis melainkan juga membangun pasukan-pasukan bersenjata Lebanon yang melawan Israel dan berhasil mengusir keluar Israel pada tahun 2000 setelah 20 tahun menduduki Lebanon. Selain memimpin Lebanon Selatan dalam ranah pemerintahan, Hizbullah dikenal dengan pasukan bersenjata yang cukup kuat dan solid. Kuatnya peran partai politik sektarian dan dominannya dalam pemerintahan Lebanon menjadikan beragam partai politik tersebut menguasai sektor badan-badan usaha milik negara dan berbagai sektor-sektor penting lainnya. Hal ini berkaitan dengan sumber-sumber dana partai yang dihasilkan dari sektor-sektor domestik negara seperti keuntungan yang didapat dari SPBU, *mini-market*, perusahaan ekspor-impor, perusahaan semen, perusahaan keamanan, operasi *real estate*, sekolah, media. Selain itu, kebanyakan pihak partai menerbitkan surat kabar, majalah, dan

memiliki situs online. Setidaknya lima jaringan televisi satelit besar dan lebih dari lima stasiun radio telah dimiliki secara pribadi dan dioperasikan oleh pihak partai politik di pemerintahan yang mempekerjakan ratusan pengikut, seperti FutureTV, NBN, Al-Manar, dan OTV 6 (Mazzucotelli, 2020).

Koalisi politik dalam pemerintahan Lebanon juga menjadi hal yang krusial dalam melihat dinamika politik di negara tersebut. Dalam mencapai kekuasaan, partai-partai membangun aliansi dalam rangka menguatkan pengaruh partai dan posisinya di pemerintahan. Dalam koalisi politik sektarianisme di Lebanon, ada dua pendekatan utama, yakni formal dan informal. Koalisi ini memungkinkan partai-partai politik sektarianisme untuk bekerja sama dengan pengusaha dalam rangka mendapatkan dana atau orang-orang berpengaruh, figur religius, keluarga, dan klan tertentu yang dapat menyediakan perlindungan politik dan memiliki pengaruh yang kuat di Lebanon. Koalisi dan dukungan-dukungan dapat juga politik menyentuh kalangan-kalangan lainnya seperti pengacara, guru, insinyur dalam rangka memperkuat pengaruh politiknya di kalangan publik. Selain itu, Koalisi politik juga dibangun dengan aliansi-aliansi partai politik lainnya di pemerintahan. Aliansi ini umumnya didominasi oleh partai sektarian utama dan diketuai oleh ketua partai dari partai utama tersebut (Masri, 2024).

Blok parlemen "*change and reform*" misalnya, dimana merupakan salah satu blok parlemen utama yang dikuasai oleh partai dominan dari sekte Maronit yaitu The Free Patriotic Movement dan dibawah ketuanya yakni bernama Michael Aoun. Aliansi "Change and Reform" ini terdiri dari Partai Armenia Tashnaq dan Partai Demokrasi Druze Lebanon. Blok Parlemen menjadi suatu yang esensial dalam Parlemen Lebanon karena peran pentingnya dalam membuat keputusan politik yang krusial di pemerintahan dan dalam berhadapan dengan *political division* yang sangat dalam. Blok parlemen utama dapat menentukan arah gerak negara, nominasi dan pemilihan Presiden, Perdana Menteri, dan perwakilan. Blok parlemen dominan ini juga sangat penting dalam membuat berbagai kebijakan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan negara dan berbagai perjanjian internasional. Hal ini juga berkaitan erat dengan kepentingan sekte Kristen yang dominan di parlemen sehingga sarana parlemen dapat menguatkan posisi sekte serta berperan penting dalam memuluskan kepentingan-kepentingan sekte tersebut (Masri, 2024).

Implikasi Sistem Politik di Lebanon di Dalam dan Luar Negeri

Struktur politik Lebanon yang sektarian menciptakan dinamika kompleks. Hal ini dikarenakan berbagai komunitas berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka. Hal ini sering kali mengarah pada konflik internal dan ketegangan, karena kelompok-kelompok tersebut berusaha memanfaatkan pertentangan internasional untuk kepentingan domestik mereka. Misalnya, kelompok politik sektarian sering bertindak sebagai "negara dalam negara", membangun hubungan internasional mereka sendiri untuk memperkuat posisi mereka di dalam Lebanon. Kelompok-kelompok kontemporer yang telah mencari perlindungan di Lebanon termasuk orang-orang Armenia, Kasdim Irak, Palestina, Kurdi, Alawi, dan berbagai komunitas Ortodoks. Sebagai konsekuensinya, negara ini menjadi tempat berlindung bagi beragam kelompok dari berbagai latar belakang agama dan budaya, yang segera menemukan bahwa kelangsungan hidup domestik mereka tunduk pada lingkungan komunal yang kompleks dan kompetitif. Mengambil keuntungan dari lokasi Lebanon yang strategis, sebagian besar dari mereka datang untuk menampilkan diri mereka sebagai sekutu dari satu kekuatan regional atau lainnya. Hal ini memiliki dua tujuan. Pertama, di tingkat domestik, kelompok-kelompok tersebut datang untuk mendapatkan perlindungan dari sponsor asing dan melindungi diri mereka sendiri dari penuntutan internal oleh kelompok-kelompok saingan. Kedua, mereka datang untuk bertukar keuntungan ekonomi dan strategis dengan sponsor asing mereka (Arâş, 2024).

Afiliasi agama dari kelompok-kelompok ini telah menjadi aspek utama dalam hubungan patrimonial ini (juga disebut sebagai kompradorialisme). Lebanon, yang terletak di persimpangan berbagai peradaban dan kekuatan internasional, menarik perhatian global yang signifikan. Keterlibatan aktor

internasional, seperti Arab Saudi dan Iran, dalam urusan dalam negeri Lebanon menunjukkan bagaimana politik Lebanon dipengaruhi oleh kepentingan luar. Arab Saudi, misalnya, telah berusaha untuk mengekang pengaruh Iran di Lebanon dengan mendukung sekutu-sekutu Sunni, sementara Iran memperkuat posisinya melalui dukungan kepada kelompok-kelompok Syiah. Opini publik Lebanon menekankan fakta bahwa sistem sektarianismenya sangat terbuka terhadap pengaruh asing, sehingga menghasilkan kondisi politik dan identitas nasional yang terus berubah-ubah. Akibatnya, perwujudan identitas nasional Lebanon yang menyatukan dan kesetiaan kepada negara belum tercapai dalam konteks sistem politik sektarianisme yang sangat majemuk dan memecah belah (Salamey, 2014).

Kekuatan-kekuatan asing menjadi sangat berpengaruh terhadap kondisi politik Lebanon yang kompleks. Peran berbagai kekuatan asing ini menjadi kuat akibat adanya sistem politik sektarianisme yang diusung di Lebanon. Sistem ini menjadi pintu utama masuknya berbagai intervensi asing yang melekat di Lebanon. Kekuatan-kekuatan asing memanfaatkan hal tersebut dalam rangka memuluskan kepentingan-kepentingannya serta menancapkan pengaruhnya di Lebanon (Nainggolan, 2020). Menelaah mengenai kekuatan-kekuatan asing yang berpengaruh di Lebanon merupakan sebuah hal yang krusial dalam melihat dinamika politik dalam negeri Lebanon secara keseluruhan. Berikut ini merupakan negara-negara yang memainkan peran penting dalam kancah politik dalam negeri Lebanon:

Suriah

Lebanon dan Suriah secara geopolitik didirikan oleh kolonialisme Perancis dari tanah yang diperoleh dari Kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia I. Oposisi pan-Arab dan pan-Suriah yang signifikan terhadap pembentukan nasional pasca-kolonial ini muncul selama periode pasca-negara (pasca-Perang Dunia II). Oposisi ini mencapai puncaknya ketika gerakan pan-Arab Nasserisme di Mesir (1950-an) dan Partai Ba'ath di Suriah (1960-an) mengklaim kekuasaan. Suriah dan Mesir berusaha menentang pendirian geopolitik kolonial dan, bersama-sama, merumuskan Republik Arab Bersatu. Suriah, di bawah pemerintahan Ba'ath, menolak pembagian negara Arab secara kolonial dan hanya mengakui kedaulatan Lebanon pada tahun 2008, yang diikuti dengan pertukaran kedutaan besar. Akan tetapi, peran Suriah dalam membentuk politik Lebanon sangat besar, terutama setelah intervensi militer langsungnya di negara tersebut yang berlangsung dari tahun 1976 hingga 2005 (Young et al., 2014).

Protes publik anti-Suriah pada tanggal 14 Maret 2005 yang diikuti pembunuhan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri dikenal luas sebagai Revolusi Cedar (Clark & Zahar, 2015). Revolusi ini mencerminkan ketidakpuasan publik yang luas dan ketidakpuasan terhadap kehadiran Suriah yang terus menerus di negara itu dan memberikan tekanan tambahan terhadap peran Suriah di Lebanon. Penarikan paksa militer Suriah pada bulan April 2005, bagaimanapun juga, tidak mengakhiri pengaruh politik dan bahkan pengaruh militer Suriah dalam membentuk politik dalam negeri Lebanon. Peran ini diperoleh melalui sekutu-sekutu dan kelompok-kelompok proksi loyalis yang dipimpin oleh Hizbullah, yang memainkan peran oposisi terhadap pemerintah Saniora yang baru dibentuk dan sebagian besar dianggap anti-Suriah.

Perjuangan Sunni-Syiah di Lebanon menekankan perjuangan regional yang berkembang melalui cara-cara sektarian. Rezim Alawi yang berkuasa dan dominan di Suriah, dan berkoordinasi dengan rezim Syi'ah di Iran, mencari aliansi yang lebih dekat dengan kelompok-kelompok Syi'ah di Lebanon, seperti Hizbullah dan Amal. Serangkaian manuver politik yang dilakukan oleh sekutu-sekutu Suriah mencegah musuh-musuhnya untuk memonopoli kekuasaan politik. Manuver-manuver ini menghasilkan terpilihnya presiden Lebanon "konsosiasionis", Michel Suleiman, pada tahun 2008, terpilihnya kembali loyalis Suriah, Nabih Berry, sebagai Ketua Parlemen pada tahun 2009, terbentuknya pemerintahan di mana para pendukung Suriah memiliki hak veto atas nasib dan keputusan-keputusannya pada tahun 2009, dan pada akhirnya penggulingan pemerintahan Hariri yang pro-Barat dan digantikan oleh pemerintahan Mikati yang pro-Suriah pada tahun 2011. Hal ini terlepas

dari fakta bahwa aliansi Syiah dan Kristen pro-Suriah dikalahkan dalam pemilihan Parlemen tahun 2005 dan 2009 yang memenangkan koalisi anti-Suriah Sunni-Syiah-Kristen (Salamey, 2014).

Hubungan diplomatik formal antara kedua negara didirikan pada tahun 2008 sebagai bagian dari kesepakatan politik yang dicapai di Doha pada tahun yang sama. Perjanjian Doha mempertahankan porsi kekuasaan yang signifikan dari sekutu Suriah dalam pemerintahan persatuan nasional. Hubungan diplomatik diresmikan dan kedutaan besar dan duta besar dipertukarkan. Setelah itu, hubungan politik antara kedua negara membaik, Perdana Menteri anti-Suriah yang baru terpilih dan pemimpin Sunni Saad Hariri mengunjungi Suriah dan bertemu dengan Presiden Bashar Assad pada tahun 2009 dalam upaya untuk memulai kembali hubungan yang macet antara kedua negara. Namun, pada tahun 2011, pemerintahan Hariri runtuh dan digantikan oleh pemerintahan pro-Suriah di bawah Perdana Menteri baru Najib Mikati, yang juga menjanjikan pemulihan hubungan yang kuat antara kedua negara. Sebelum gejolak Suriah yang dimulai pada tahun 2011, Suriah merupakan mitra ekonomi utama bagi Lebanon dengan perjanjian bilateral yang mendorong transfer produk, barang, modal, dan tenaga kerja secara bebas melintasi perbatasan (Salamey, 2014).

Israel

Sejak penerbangan awal pengungsi Palestina ke Lebanon dan pembentukan negara Israel pada tahun 1948, kedua negara berada dalam keadaan perang. Situasi ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi, manusia, dan politik yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Lebanon memandang negara Israel sebagai sebuah entitas yang ekspansionis dan dibentuk secara ilegal, dengan tujuan untuk menguasai air dan tanah Lebanon. Lebanon telah menuntut hak semua pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka sesuai dengan Resolusi 171 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Di sisi lain, Israel menuduh Lebanon menyembunyikan kelompok-kelompok teroris Palestina yang bermusuhan yang bertujuan untuk menghancurkan negara Israel. Konfrontasi militer dan intensitasnya antara kedua negara telah bervariasi sepanjang perjuangan panjang mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Lebanon tidak berpartisipasi dalam Perang Enam Hari 1967 dengan Israel, perang gesekan antara kedua negara terjadi, dengan gerilyawan Palestina melintasi perbatasan dan menyerang pos-pos dan pemukiman Israel. Israel melakukan operasi militer terhadap orang-orang Palestina dan para pendukung mereka di Lebanon jauh di dalam Lebanon. Israel, segera setelah itu, terlibat lebih jauh dalam politik dalam negeri Lebanon (Salamey, 2014).

Pada tahun 1975, Israel mulai mendukung kontingen Angkatan Darat Lebanon yang sebagian besar beragama Kristen di Lebanon Selatan yang menentang kehadiran pasukan bersenjata Palestina di negara itu. Lebanon Selatan menjadi medan pertempuran utama antara kelompok-kelompok bersenjata Lebanon dan Palestina. Pada tahun 1979, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Palestina dan sekutu-sekutu sayap kiri di Lebanon Selatan dan membentuk zona keamanan yang sebagian dikendalikan oleh Angkatan Darat Lebanon Selatan. Israel menjadi semakin bercokol dalam politik domestik Lebanon dengan mendukung kelompok-kelompok Kristen anti-Suriah dan anti-Palestina yang memerangi warga Lebanon lainnya. Pada tahun 1982, Israel melancarkan invasi besar-besaran ke Lebanon yang bertujuan untuk mengusir kehadiran militer Palestina di negara tersebut. Serangan ini berhasil menghancurkan sebagian besar pangkalan Palestina di negara tersebut dan memaksa evakuasi para pejuang Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dari Beirut.

Perlawanan nasional Lebanon terhadap pendudukan Israel mulai berkumpul dan memberikan pukulan serius kepada Israel. Dukungan Suriah dan Iran kepada kelompok Syiah Hizbullah menyebabkan terbentuknya Gerakan Perlawanan Islam dan kekalahan Israel di Lebanon Selatan. Pada tahun 2000, Israel menyelesaikan penarikan mundurnya secara penuh sesuai dengan Resolusi 425 DK PBB dan Tentara Lebanon Selatan yang loyalis dibubarkan secara total. Namun, penarikan total Israel dari Lebanon tetap menjadi sumber perselisihan, yang menjadi dalih bagi Hizbullah untuk terus

mempertahankan kehadiran bersenjata. Keterlibatan militer terbatas terus berlanjut setelah penarikan tahun 2000. Pada tahun 2006, Hizbullah menculik tiga tentara Israel dan meminta agar Israel menukar sandera itu dengan tentara Hizbullah yang ditawan oleh Israel, tapi kemudian Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke Lebanon Selatan dan Distrik Selatan Beirut. Perang yang berlangsung selama 33 hari ini menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi dan kerusakan serius pada infrastruktur sipil Lebanon. Pengakhiran permusuhan akhirnya diserukan dalam Resolusi DK PBB 1701 dan kesepakatan untuk menukar empat tahanan Lebanon di penjara-penjara Israel, yaitu tiga pasukan Hizbullah dan 1 politisi Druze, dengan jasad tiga tentara Israel yang terbunuh dalam perang tersebut. Israel terus menganggap kehadiran Hizbullah di Lebanon, yang didukung oleh Iran, sebagai salah satu ancaman paling signifikan terhadap keamanannya (Salamey, 2014).

Arab Saudi

Lebanon memiliki hubungan historis, budaya, bahasa dan geografis yang penting dengan dunia Arab. Negara-negara Teluk Arab adalah salah satu mitra ekonomi terpenting Lebanon, yang menyediakan pasar paling penting untuk barang dan jasa Lebanon, dengan Arab Saudi sebagai pemimpinya. Kisah hubungan antara Arab Saudi dan Lebanon telah ditandai oleh siklus persahabatan dan permusuhan, terkadang secara bersamaan—hubungan cinta-benci yang akhirnya membuat Arab Saudi menjauh, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Alasan utama kekecewaan Saudi terhadap Lebanon adalah kekuatan Hizbullah dan pelindungnya, Iran (Ghaddar, 2023). Sejak 1950-an hingga 1970-an, jalur pipa minyak utama menghubungkan Saudi dengan Lebanon melalui Suriah, sementara ekonomi Lebanon yang terbuka menarik investor dan turis Saudi. Keberadaan komunitas Sunni yang besar memperkuat hubungan ekonomi dan budaya, termasuk ekspor tenaga kerja serta produk pertanian ke Saudi. Setiap tahun, ribuan Muslim Lebanon menjalankan ibadah Haji di Saudi, dan perkawinan campuran antara warga kedua negara menjadi hal umum. Hubungan ini juga terlihat dalam kontribusi tokoh seperti Talal bin Abdul Aziz Saud dan Rafik Hariri, yang melalui bisnis dan politiknya memainkan peran besar dalam hubungan Saudi-Lebanon.

Aliansi politik Arab Saudi yang dekat dengan Amerika Serikat dan Eropa serta penentangannya terhadap Nasserisme, Ba'athisme, dan Komunisme mengalihkan dukungannya kepada umat Kristen Lebanon dan khususnya Chamounis selama tahun 1950-an dan bahkan pada tahun 1970-an. Namun, peran utama Saudi dalam politik Lebanon berkembang pada akhir 1980-an dalam upaya untuk membantu mengakhiri perang saudara di Lebanon. Upaya Saudi membuahkan hasil setelah berhasil mengumpulkan faksi-faksi utama Lebanon yang bertikai di kota Taef untuk merumuskan perjanjian konstitusional baru dan untuk mengatur ulang kekuatan politik di negara tersebut dan, akibatnya, mengakhiri perang. Sejak saat itu, keterlibatan Arab Saudi dalam urusan dalam negeri Lebanon semakin meningkat. Pertama, Arab Saudi membantu sekutu dekatnya, miliarder Sunni Rafik Hariri, menjadi perdana menteri Lebanon pada tahun 1992. Kedua, Arab Saudi memberikan dukungan keuangan dan investasi yang signifikan untuk membangun kembali negara tersebut setelah perang saudara yang menghancurkan pada tahun 1975-1989 dan perang Israel pada tahun 2006. Ketiga, Arab Saudi menjadi semakin mengakar dalam urusan dalam negeri Lebanon dalam upayanya untuk mengekang pengaruh Iran dan Syiah di Lebanon, Irak, Suriah, dan Palestina (Salamey, 2014).

Iran

Hubungan Iran-Lebanon diyakini dapat ditelusuri kembali ke abad keenam belas ketika dinasti Safafid di Persia berusaha mengadopsi Syiah Dua Belas sebagai agama negara. Kemudian, Shah Safafid mengimpor para sarjana dari Lebanon dan negara-negara Teluk untuk membantu penyebaran Syiah dan prinsip-prinsip teologisnya ke seluruh Persia. Kehadiran situs-situs suci Syiah di berbagai kota di Iran menarik para peziarah Lebanon untuk berziarah dan mempelajari teologi selama abad ke-20. Kebangkitan hubungan Lebanon-Iran mencapai puncaknya setelah kemenangan Revolusi Islam Iran

pada 1979. Revolusi itu dipimpin Ayatollah Khomeini, seorang ulama Syiah yang menyusun sistem politik *Wilayat-al-Faqih* (“kekuasaan para *faqih*,” yaitu ahli hukum Islam) dan ia menyatakan bahwa setiap Muslim berkewajiban untuk memerangi Israel dan membebaskan Palestina. Banyak orang Syiah Lebanon yang terinspirasi oleh model revolusioner Iran, dan dengan demikian mengadopsi interpretasi teologis baru Khomeini dan menjadi tunduk pada peniruannya (Nainggolan, 2020).

Upaya Iran untuk mengeksport revolusi ke negara-negara sekitarnya mencapai Lebanon pada awal 1980-an dengan para pemuda Syi'ah Lebanon yang bergabung dengan kamp-kamp pelatihan yang didirikan di Lembah Bekaa oleh Garda Revolusi Iran. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah gerakan politik-persenjataan (*armed political movement*) yang melakukan resistensi dan perang suci (Jihad) melawan pendudukan Israel di Lebanon, hegemoni Amerika Serikat serta penjajahan Israel terhadap Palestina (Saouli, 2024). Pada tahun 1985, beberapa faksi berkumpul dan mendeklarasikan pembentukan Hizbullah. Partai baru ini menjadi subjek dukungan militer dan keuangan Iran yang luas. Setelah berbagai operasi militer yang sukses melawan pasukan pendudukan Israel, partai ini mendapatkan popularitas dan dukungan yang signifikan di kalangan komunitas Syiah di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 2000, Hizbullah berhasil mengalahkan Israel dan menjadi aktor penting yang melakukan penarikan paksa pasukan Israel dari Lebanon serta membebaskan semua tahanan Lebanon. Kemenangan Hizbullah-Lebanon atas Israel ini terjadi berkat dukungan kuat Iran dan Suriah, yang merupakan dua sekutu utama Hizbullah di kawasan Timur Tengah. (Khan & Zhaoying, 2020; Saouli, 2024).

Hizbullah terus mendapatkan kekuatan dan momentum dengan kepentingan Iran yang dilayani dengan baik dalam merongrong pengaruh Israel di wilayah tersebut. Operasi Hizbullah segera meluas hingga menjangkau wilayah-wilayah lain, yang semakin memajukan hegemoni Iran. Peran paling signifikan yang dimainkan oleh partai ini adalah membantu pejuang Hamas Palestina di Gaza dan membantu memperkuat hubungan antara Suriah, Iran, dan Palestina. Pada tahun 2010, rezim Hosni Mubarak di Mesir berhasil menangkap dan membongkar operasi penyelundupan senjata utama yang dipimpin Hizbullah untuk Hamas di perbatasan Mesir-Gaza dan menangkap salah satu operator utamanya. Pemimpin Hizbullah yang terbunuh di Suriah, Imad Moughneyah, dikenal sebagai salah satu arsitek utama di balik koordinasi militer antara Iran, Suriah, Hamas, dan Hizbullah. Kegiatan-kegiatan lain dari partai-partai tersebut, yang melayani kepentingan Iran di kawasan ini semakin meluas ke berbagai negara Teluk Arab termasuk Irak, Kuwait, dan Bahrain. Secara geopolitik, pergerakan poros Iran (meliputi Hizbullah dan Suriah) tidak lepas dari berbagai aksi Israel di kawasan Timur Tengah. Pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Arab dan operasi-operasi militernya di Timur Tengah menjadikan adanya perlawanan yang signifikan dari aktor-aktor seperti Hizbullah, Iran, maupun Suriah. Pergerakan Israel tentunya membawa ketidakamanan negara-negara sekitarnya sehingga hal ini memicu peperangan yang kompleks dan instabilitas politik yang tinggi di kawasan Timur Tengah (Byman et al., 2024; Kurkjian, 2009).

Selain itu, hubungan Iran-Lebanon diperkuat dengan adanya dukungan besar dari Iran untuk membiayai berbagai jaringan sosial Hizbullah dan kegiatan-kegiatan di kalangan komunitas Syiah. Ini termasuk pembiayaan sekolah, rumah sakit, usaha *real-estate*, serta beberapa kegiatan ekonomi antara kedua negara. Setelah perang tahun 2006 di Lebanon, Iran membiayai banyak proyek rekonstruksi di Lebanon Selatan yang mencakup pembangunan kembali gedung-gedung yang hancur, jembatan, jalan, pusat rehabilitasi, dan masjid. Iran dan Lebanon telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di beberapa sektor. Sebagai contoh, perwakilan dari kedua negara menandatangani nota kesepahaman pada bulan Juni 2010, setuju untuk terus mengadakan pertemuan komisi untuk memeriksa hubungan ekonomi setiap empat bulan. Kesepakatan ini diselesaikan setelah pertemuan lanjutan dari komisi ekonomi bersama keenam antara kedua negara (Khan & Zhaoying, 2020).

Hubungan Iran-Lebanon mencapai puncaknya setelah ancaman Israel yang berulang kali untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran menemukan peran pencegahan strategis untuk dimainkan dalam posisi Hizbullah dan komunitas Syiah di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Rudal-rudal Iran yang ditempatkan di wilayah Hizbullah siap untuk diluncurkan ke Israel sebagai pembalasan terhadap serangan Israel yang menargetkan Iran. Perang tahun 2006 menjadi pengingat yang jelas bagi Israel tentang kemampuan Hizbullah untuk menyerang situs-situs penting dan utama di dalam wilayah Israel. Hal ini telah membuat Israel enggan untuk melakukan usaha militer di Iran. Tentu saja, dukungan Iran kepada Hizbullah dan komunitas Syi'ah Lebanon telah mengkhawatirkan kelompok-kelompok sektarian lainnya yang khawatir akan ketidakseimbangan sektarian yang mendukung Syi'ah. Hal ini terutama karena dukungan tersebut melibatkan persenjataan yang signifikan dari komunitas Syi'ah tanpa kontrol dari negara atau lembaga-lembaga yang dipilihnya (El-Husseini & Leichtman, 2019).

Perancis

Eropa merupakan rumah bagi kekuatan kolonial tradisional. Bagi Lebanon, hal ini telah memberikan pengaruh budaya dan politik yang signifikan terhadap semua aspek kehidupannya. Sebagai rumah bagi Vatikan, negara ini memberikan aspirasi keagamaan yang berkesinambungan bagi komunitas Katolik Lebanon yang besar dengan berbagai dominasinya. Akan tetapi, Perancis dapat disebut sebagai kekuatan besar Eropa yang memainkan peran paling penting dalam membentuk politik dan masyarakat Lebanon sepanjang abad kedua puluh. Bagaimanapun juga, fondasi geopolitik Lebanon modern berakar pada kolonialisme Perancis. Di bawah Mandat Perancis, Lebanon dan Suriah dideklarasikan sebagai dua entitas administratif politik di bawah pemerintahan kolonial, dan kemudian menjadi negara merdeka yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun masa penjajahannya yang relatif singkat di Lebanon, Perancis meninggalkan jejak besar dalam fondasi negara dan masyarakat. Hampir setiap aspek dari kehidupan modern. Pemerintahan Lebanon dibentuk oleh Perancis termasuk konstitusi, Parlemen, dan distrik administratifnya. Seperti halnya Iran dan Arab Saudi, jejak Perancis berasal dari keberadaan komunitas Katolik yang substansial, sebagian besar Maronit, yang terkait dengan Vatikan dan Eropa (Machmudi, 2021).

Peran proteksionisme Perancis terhadap Maronit di Lebanon dimulai pada masa Ottoman dan berlanjut setelah negara ini berada di bawah Mandat. Perancis setelah Perang Dunia I (Yakoubi, 2022). Hubungan Perancis-Lebanon dengan cepat menguat, dengan diadopsinya bahasa Perancis sebagai bahasa kedua di negara ini. Lebanon yang berbahasa Perancis, di bawah pemerintahan Maronit yang dominan, meningkatkan kerja sama budaya, politik, dan ekonominya dengan Perancis. Perancis melakukan intervensi militer dan politik beberapa kali untuk mendukung kaum Maronit selama perang saudara di Lebanon atau untuk menyediakan pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari pasukan multinasional yang berusaha membantu evakuasi warga Palestina dari Lebanon pada tahun 1982, atau sebagai bagian dari Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) selama berbagai periode pertempuran Israel-Lebanon. Puncak hubungan Lebanon-Perancis baru tercapai setelah terpilihnya Presiden Perancis Jacques Chirac, seorang teman dekat Perdana Menteri Sunni Lebanon Rafik Hariri (Salamey, 2014).

Dukungan Perancis untuk Lebanon terlihat dalam tiga pertemuan ekonomi utama yang menghasilkan lebih dari \$10 miliar bantuan, termasuk \$7,5 miliar dari KTT Paris III 2007 (Ministry of Finance Lebanon, 2008). Pada 23 Januari 2010, kedua negara menyepakati perjanjian keamanan yang mencakup kerja sama dalam pencegahan perdagangan narkoba dan senjata, imigrasi ilegal, serta kejahatan dunia maya. Hubungan Chirac-Hariri menandai perubahan besar dalam pemulihan hubungan Perancis-Lebanon yang sebelumnya berfokus pada kepemimpinan Kristen Lebanon. Sebelum hubungan ini terwujud, sekte Sunni dan Syi'ah memandang kebijakan Perancis dengan penuh kecurigaan, karena percaya bahwa Perancis berusaha untuk membangun kembali pengaruh kolonialnya melalui kaum Maronit di Lebanon. Kecurigaan ini ditekankan karena kaum Maronit menolak untuk

mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa Arab (Arabisme) dan bersikeras pada hubungan budaya mereka yang erat dengan Barat Kristen, dan khususnya Perancis. Akan tetapi, era Hariri di Lebanon merekonstruksi keselarasan ini, terutama setelah Perancis mulai mengembangkan pandangan kritis terhadap Iran dan hegemoni yang diperluas terhadap wilayah pengaruh pasca-kolonial Perancis (Lebanon dan Suriah). Perancis mulai melihat kaum Sunni, yang terancam oleh meningkatnya pengaruh Iran dan Syiah, sebagai sekutu yang penting. Hasil dari pemulihan hubungan ini adalah lanskap sektarian Lebanon menjadi terbagi secara berbeda sehubungan dengan peran Perancis, di mana sebagian besar Sunni dan Druze serta separuh dari komunitas Kristen mendukung, sementara ditentang oleh sebagian besar Syiah dan separuh dari komunitas Kristen (El-Husseini & Leichtman, 2019).

Amerika Serikat

Interaksi Amerika Serikat dengan Lebanon berawal dari peristiwa krisis Lebanon tahun 1958, ketika Marinir AS mendarat di pantainya untuk mendukung posisi pemerintah pro-Barat Camille Chamoun melawan lawan-lawannya yang berasal dari kalangan Arab. Presiden AS Eisenhower mengesahkan Operasi Blue Bat pada tanggal 15 Juli 1958, untuk membantu pemerintah Lebanon. Ini adalah aplikasi pertama dari Doktrin Eisenhower di mana Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan melakukan intervensi untuk melindungi negara-negara yang "terancam oleh Komunisme internasional" (Abadi, 2020). Pada awal 1980-an, setelah dimulainya Perang Saudara 1975 dan invasi Israel pada 1982, Amerika Serikat, sekali lagi, melakukan intervensi di Lebanon untuk membantu presiden pro-Barat yang baru saja dilantik, Amin Jemayel, dan melemahkan lawan-lawannya di dalam negeri. Serangan bunuh diri terhadap barak Marinir AS merenggut nyawa hampir 240 tentara AS dan, akibatnya, memaksa penarikan AS dari negara tersebut. Sentimen anti-AS meningkat, yang mengarah ke berbagai insiden termasuk pembajakan pesawat TWA, serta berbagai penculikan dan pembunuhan profesor AS yang mengajar di universitas-universitas Lebanon. Amerika Serikat menarik sebagian besar diplomatnya dari negara tersebut dan mengeluarkan berbagai larangan perjalanan.

Revolusi Cedar pada tahun 2005 dan penarikan paksa pasukan Suriah dari Lebanon membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk memperbaiki perannya di negara ini dan memberikan dukungan bagi pemerintah pro-Barat yang baru dibentuk oleh Fuad Saniora (Abadi, 2020). Meskipun terjadi perang antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006, Amerika Serikat terus memberikan bantuan keuangan dan ekonomi yang signifikan kepada Lebanon. Pemerintahan Presiden AS Bush meminta dan Kongres menyetujui peningkatan yang signifikan dalam bantuan AS untuk Lebanon. Amerika Serikat menjanjikan 890 juta dolar dalam bentuk dukungan militer dan ekonomi untuk Lebanon selama KTT Paris III. Hubungan AS-Lebanon terus membaik setelah Perdana Menteri Saad Hariri mulai menjabat pada tahun 2009 dengan meningkatnya dukungan keuangan yang diberikan. Meskipun jumlah penduduk Lebanon kurang dari empat juta jiwa, negara ini menduduki peringkat ke-64 sebagai pasar terbesar untuk ekspor AS dan kesepuluh penerima bantuan luar negeri terbesar. Pada awal tahun 2009, Amerika Serikat mengeksport barang senilai hampir satu miliar dolar ke Lebanon.

Kebijakan AS terhadap Lebanon berpusat pada pembatasan pengaruh Iran dan Suriah. Amerika Serikat telah menempatkan Hizbullah dalam daftar terorisnya, melarang partai ini untuk menerima bantuan keuangan atau politik dari Amerika. Berbagai tokoh Lebanon yang anti-Amerika juga termasuk dalam "daftar hitam" Amerika Serikat, yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan visa masuk ke Amerika Serikat dan menempatkan rekening keuangan mereka di bawah pengawasan. Lembaga-lembaga keuangan dan perbankan Lebanon juga ditempatkan di bawah pengawasan ketat Amerika Serikat, karena dikhawatirkan terjadi pencucian uang dan transaksi yang membiayai gerakan-gerakan anti-Amerika atau oleh Barat disebut sebagai "kelompok teroris". Dalam hal hubungan sektarian, dan sepanjang era Perang Dingin, Amerika Serikat telah mendukung Kristen Maronit (Abadi, 2020), yang menentang nasionalisme Arab dan pengaruh Soviet di wilayah tersebut. Selama periode yang sama,

sebagian besar kontingen nasionalis sayap kiri dan Muslim menganggap Amerika Serikat sebagai negara imperialis, yang paling jelas terlihat dalam dukungan dan bantuannya kepada Israel untuk melawan aspirasi populasi Arab dan Palestina yang lebih besar. Niat imperialis juga ditunjukkan dalam kepentingan strategis AS untuk mengendalikan sumber, aliran, dan harga minyak Timur Tengah.

Dukungan AS terhadap monarki dan rezim-rezim penindas di Timur Tengah seperti rezim Iran di bawah Shah meningkatkan keyakinan masyarakat akan adanya standar ganda AS dalam mempromosikan demokrasi di seluruh kawasan. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran tahun 1979, komunitas Syi'ah di Lebanon semakin memusuhi Amerika Serikat. Bukan hanya karena pemimpin Syi'ah Iran Ayatollah Khomeini menyatakan Amerika Serikat sebagai Setan Besar, tetapi juga karena Amerika Serikat terus melindungi Israel dari kecaman internasional atas pendudukannya di wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah Syi'ah di Lebanon Selatan selama tahun 1980-an dan 1990-an. Permusuhan Syi'ah terhadap Amerika Serikat semakin memburuk setelah naiknya pemimpin Sunni pro-Barat Rafik Hariri menjadi perdana menteri. Hariri memimpin perubahan besar dalam sekte Sunni yang mendukung pemulihan hubungan dengan negara-negara Barat. Sebagai seorang pengusaha modernis, Hariri mengupayakan liberalisme ekonomi, keterbukaan, dan investasi Barat dalam pembangunan kembali Lebanon. Posisi Hariri membuat khawatir kaum Syi'ah dan juga beberapa orang Kristen, yang telah melihat dalam aliansi Sunni-Barat terjadi penurunan peran strategis mereka terhadap kepentingan Barat di wilayah tersebut. Sebagai balasannya, pemimpin Kristen Michael Aoun mencari aliansi yang lebih dekat dengan Hizbullah, Iran, dan Suriah, setelah kembali dari pengasingannya di Perancis pada tahun 2005. Hubungan Kristen Lebanon dengan Amerika Serikat sangat menurun di tengah perpecahan di kalangan Kristen atas strategi Aoun.

Rusia

Rusia mengambil kebijakan luar negeri dari warisan Uni Soviet, yang terus berusaha memperluas pengaruhnya di Timur Tengah (Tashjian, 2021). Rusia memiliki kehadiran budaya yang penting di Lebanon yang berasal dari awal 1950 -an, khususnya ketika Kedutaan Besar Rusia membuka pusat budaya pertamanya di Beirut pada tahun 1951 (Mahmoud, 2019). Di Lebanon, Rusia terus mendukung pengawasan Suriah atas negara tersebut dan mengkritik kebijakan-kebijakan Israel. Setelah penarikan mundur Suriah pada 2005, peran Rusia menurun di negara itu, namun secara implisit tampak mendukung koalisi 8 Maret dan menentang aliansi anti-Suriah.

Kerjasama Rusia-Lebanon mencakup berbagai bidang, termasuk budaya, militer, ekonomi, dan diplomasi. Rusia meningkatkan pengaruh budayanya dengan mendirikan sembilan pusat kebudayaan sejak 2009 dan menawarkan beasiswa bagi mahasiswa Lebanon. Dalam aspek keagamaan, Rusia mempererat hubungan dengan gereja-gereja Lebanon, termasuk Gereja Ortodoks dan Maronit (Mahmoud, 2019). Mengingat kebangkitan sektarian yang semakin dalam dan perpecahan di wilayah tersebut, komunitas Kristen Ortodoks yang cukup besar di Lebanon dan Suriah, bersama dengan komunitas Ortodoks Armenia, semakin meningkatkan prospek sponsor Ortodoks Rusia yang lebih besar di wilayah tersebut (Tashjian, 2021). Membangun hubungan yang lebih kuat dengan Rusia sebagai patron sektarian yang serupa dengan sekte-sekte lain semakin muncul sebagai pilihan yang menarik di tengah polarisasi sektarian regional. Hal ini terutama terjadi karena dukungan Rusia terhadap Iran dan Armenia menyatu dengan dukungannya terhadap aliansi Alawi, Syiah, dan Ortodoks di Lebanon dan Suriah.

Turki

Sebagai pewaris modern Kekaisaran Ottoman, Turki mewarisi pengaruh luas atas politik dan budaya di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Lebanon. Untuk mengelola komunitas sektarian yang beragam, Ottoman menerapkan sistem Millet, yang memberi minoritas non-Muslim otonomi terbatas serta pengecualian dari dinas militer dengan imbalan pajak lebih tinggi. Sistem ini memungkinkan umat

Kristen dan Yahudi mempertahankan identitas mereka meskipun menghadapi diskriminasi hukum Syariah dan penuntutan berkala. Pengaruhnya terhadap Lebanon sangat besar, mulai dari pelestarian praktik keagamaan dan budaya dalam sistem feodal, persaingan kelompok untuk dukungan Ottoman, hingga transformasi Millet menjadi entitas politik yang menjalin hubungan eksternal saat Kesultanan runtuh (Ash-Shallabi, 2021).

Periode setelah kekalahan Ottoman dan pendirian Turki modern menyaksikan penarikan secara bertahap kepentingan luar negerinya dari wilayah MENA. Afiliasi Turki dengan NATO yang kemudian melawan kubu Soviet membuatnya lebih dekat dengan Israel dan aliansi Barat, dan dengan demikian melemahkan perannya di sebagian besar wilayah MENA, termasuk Lebanon. Setelah disintegrasi Uni Soviet, Turki mengajukan tawaran yang kuat untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE). Akan tetapi, penolakan Uni Eropa, dan meningkatnya pengaruh regional Iran dengan munculnya kekuatan Kurdi di Irak Utara, yang menyusul jatuhnya pemerintahan terpusat yang kuat dari Saddam Hussein, membuat Turki sangat khawatir. Pada abad kedua puluh satu, Turki mulai mengalihkan perhatiannya kembali ke wilayah tersebut, memainkan peran utama dalam urusan MENA. Musim Semi Arab memberi Turki kesempatan baru untuk menunjukkan solidaritas Islam Sunni dengan Sebagian besar penduduk yang memberontak. Di Palestina, Lebanon, dan Suriah, Turki mulai muncul sebagai kekuatan besar yang secara langsung mengintervensi sebagian besar urusan mereka (Uliyah, 2021). Hubungan Lebanon-Turki telah menyaksikan kerja sama ekonomi dan politik yang penting, terutama setelah naiknya Rafik Hariri menjadi Perdana Menteri Lebanon (Rabil, 2021).

Kepentingan Nasional Lebanon dalam Dinamika Politik dan Sosial

Kepentingan nasional Lebanon ditentukan oleh kompleksitas politik domestik dan dinamika geopolitik di kawasan. Sebagai negara dengan sistem politik berbasis sektarianisme, kepentingan nasional Lebanon sering kali dikompromikan oleh tarik-menarik kepentingan kelompok politik dan religius yang berbeda. Salah satu tantangan terbesar dalam merumuskan kepentingan nasional Lebanon adalah keberlanjutan model politik berbasis patronase yang cenderung memperkuat kepentingan elite daripada negara secara keseluruhan (Mouawad, 2017). Struktur ini membuat kebijakan negara lebih sering diarahkan untuk mempertahankan stabilitas sektarian daripada membangun kebijakan publik yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan (Clark & Salloukh, 2013).

Selain faktor domestik, kepentingan nasional Lebanon juga sangat dipengaruhi oleh situasi geopolitik, terutama konflik di Suriah dan ketegangan regional antara Iran dan negara-negara Teluk. Krisis pengungsi Suriah yang menyebabkan lebih dari satu juta warga Suriah mencari perlindungan di Lebanon telah menjadi tantangan besar bagi stabilitas sosial dan ekonomi negara ini (Meier, 2014). Di sisi lain, ketegangan antara kelompok-kelompok politik yang pro dan anti-Suriah semakin memperumit pengambilan keputusan politik di tingkat nasional (Gade, 2024). Keterlibatan aktor eksternal seperti Iran, Arab Saudi, dan Suriah dalam politik domestik Lebanon menambah kompleksitas dalam menentukan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional (Gade, 2024). Dalam konteks ini, Lebanon harus menyeimbangkan kepentingan keamanannya dengan tuntutan kemanusiaan dan tekanan internasional.

Lebanon juga menghadapi dilema antara mempertahankan "resiliensinya" sebagai negara yang bertahan dalam berbagai krisis dan kebutuhan untuk melakukan reformasi struktural guna memperkuat institusi negara. Meskipun Lebanon sering dipuji karena kemampuannya untuk tetap stabil di tengah berbagai tantangan, ketergantungan pada sistem patronase dan lemahnya institusi negara telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan tata kelola yang baik (Mouawad, 2017). Krisis ekonomi yang berlarut-larut telah menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah (Thebian, 2020). Untuk memastikan keberlanjutan negara, diperlukan reformasi dalam tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan hukum agar Lebanon tidak terus bergantung pada elite

sektarian yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok mereka dibandingkan kepentingan negara secara keseluruhan (Clark & Salloukh, 2013). Oleh karena itu, kepentingan nasional Lebanon ke depan harus diarahkan pada penguatan institusi negara, penanganan krisis sosial-ekonomi, serta upaya meredakan ketegangan sektarian yang dapat mengancam stabilitas jangka panjang.

Setelah terbunuhnya Hasan Nasrullah yaitu pimpinan Hizbullah pada September 2024 akibat serangan bom jet tempur Israel di ibu kota Beirut, pemerintah Lebanon semakin berambisi pada kepentingan nasional yang lebih konstruktif. Lebanon kemudian melantik perdana Menteri baru yaitu Nawaf Salam dengan terdiri dari 24 menteri dan diharapkan mampu membawa reformasi yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan di negara tersebut. Setidaknya kepentingan nasional Lebanon dalam jangka pendek adalah bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah dan memperbaiki hubungan Lebanon dengan negara-negara Arab serta kepentingan jangka panjangnya adalah bagaimana agar Lebanon dapat menjaga stabilitas politik dan ekonomi secara konsisten. Kepentingan nasional ini sangat mungkin diperjuangkan sebab Lebanon dengan PM Nawaf Salam mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

KESIMPULAN

Sistem politik sektarianisme di Lebanon telah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan kekuasaan. Sistem ini membagi posisi politik utama berdasarkan identitas agama dan sektarian, Meskipun awalnya dirancang untuk menciptakan stabilitas melalui representasi yang seimbang, sistem ini justru menciptakan polarisasi yang mendalam, menghambat efisiensi pemerintahan, dan memperburuk fragmentasi sosial. Ketegangan politik dalam negeri yang diakibatkan oleh sistem sektarianisme sering kali diperparah oleh manipulasi elite politik, yang menggunakan struktur ini untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dinamika sektarian ini juga memungkinkan keterlibatan aktor eksternal, seperti Iran, Arab Saudi, Suriah, Prancis, dan Amerika Serikat. Dukungan dari negara-negara ini sering kali diberikan kepada kelompok-kelompok sektarian tertentu. Keterlibatan negara-negara ini menyentuh kepentingan strategis mereka di kawasan, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional Lebanon. Sistem politik sektarianisme Lebanon mencerminkan tantangan besar bagi stabilitas negara ini. Meskipun memberikan ruang representasi bagi berbagai komunitas, sistem ini telah menjadi penghalang utama bagi pembentukan identitas nasional yang kohesif. Kepentingan nasional Lebanon ditentukan oleh kompleksitas politik domestik dan dinamika geopolitik di kawasan. Kepentingan nasional Lebanon sering kali dikompromikan oleh tarik-menarik kepentingan kelompok politik dan religius yang berbeda sehingga hal ini menyebabkan rumitnya Lebanon dalam memaksimalkan kepentingan-kepentingan nasionalnya yang strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, J. (2020). Perception and reality in US-Lebanon relations. *Middle Eastern Studies*, 56(2), 305–326. <https://doi.org/10.1080/00263206.2019.1678466>
- Andersen, L. E. (2022). Radical Secularism and Worldview Dilemmas in Countering Sectarianism in Lebanon. *Negotiation Journal*, 38(3), 477–500. <https://doi.org/10.1111/nejournal.12413>
- Arāş, R.-M. (2024). *Orthodoxy as a Way of Living: Religion, Sect, and Crisis in Lebanon*.
- Ash-Shallabi, A. M. (2021). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah* (S. Rahman, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Bakry U.S. (n.d.). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Retrieved December 12, 2024, from <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=285594>
- Baumann, H. (2024). Bringing the State and Political Economy Back in: Consociationalism and Crisis in Lebanon. *Nationalism and Ethnic Politics*, 30(1), 85–102. <https://doi.org/10.1080/13537113.2023.2188655>

- Baytiyeh, H. (2019). Lebanon's Power-Sharing System and the Rise of Sectarianism. *Peace Review*, 31(2), 223–230. <https://doi.org/10.1080/10402659.2019.1667576>
- Byman, D., Jones, S. G., & Palmer, A. (2024). *Escalating to War between Israel, Hezbollah, and Iran*.
- Clark, J. A., & Salloukh, B. F. (2013). Elite Strategies, Civil Society, and Sectarian Identities in Postwar Lebanon. *International Journal of Middle East Studies*, 45(4), 731–749. <https://doi.org/10.1017/S0020743813000883>
- Clark, J. A., & Zahar, M.-J. (2015). Critical Junctures and Missed Opportunities: The Case of Lebanon's Cedar Revolution. *Ethnopolitics*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/17449057.2014.924659>
- Creswell, J. (2023). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Ekip. (2021). Bagaimana Sektarianisme pengaruh kebijakan luar negeri Lebanon. *Anadolu Agency*. <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/analisis-bagaimana-sektarianisme-pengaruhi-kebijakan-luar-negeri-lebanon/2441544>
- El-Husseini, R., & Leichtman, M. A. (2019). Arab Shi'ism and the Shi'a of Lebanon: New Approaches to Modern History, Contemporary Politics, and Religion. *Die Welt Des Islams*, 59(3–4), 253–281. <https://doi.org/10.1163/15700607-05934P01>
- Emery, T. J., & Spruk, R. (2024). Long-term effects of sectarian politics: Evidence from Lebanon. *Socio-Economic Review*, 22(2), 787–810. <https://doi.org/10.1093/ser/mwad004>
- Gade, T. (2024). *Lebanon on the brink*.
- Ghaddar, H. (2023). *Saudi Arabia and Lebanon: A Love-Hate Relationship*. The Washington Institute. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/saudi-arabia-and-lebanon-love-hate-relationship>
- Ghosn, F., & Parkinson, S. E. (2019). “Finding” Sectarianism and Strife in Lebanon. *PS: Political Science & Politics*, 52(03), 494–497. <https://doi.org/10.1017/S1049096519000143>
- Khan, A., & Zhaoying, H. (2020). Iran-Hezbollah Alliance Reconsidered: What Contributes to the Survival of State-Proxy Alliance? *Journal of Asian Security and International Affairs*, 7(1), 101–123. <https://doi.org/10.1177/2347797020906654>
- Kurkjian, A. (2009). Iran, Israel and Hizbollah: Stark Choices. *The World Today*, 65.
- Machmudi, Y. (2021). *Timur tengah dalam sorotan: Dinamika timur tengah dalam perspektif Indonesia*. Bumi Aksara.
- Mahmoud, S. M. (2019). Russian Influence in Lebanon and Its Implications for Iran. *Journal For Iranian Studies*. <https://rasanah-iiis.org/english/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/RUSSIAN-INFLUENCE-IN-LEBANON-AND-ITS-IMPLICATIONS-FOR-IRAN.pdf>
- Majed, R. (2021). In Defense of Intra-Sectarian Divide: Street Mobilization, Coalition Formation, and Rapid Realalignments of Sectarian Boundaries in Lebanon. *Social Forces*, 99(4), 1772–1798. <https://doi.org/10.1093/sf/soaa076>
- Masri, R. (2024). *Lebanon and the 'Trash Revolution': Constraints, Challenges and Opportunities to Transformation: 2015 Onwards*.
- Mazzucotelli, F. (2020). Fragments of Lebanon: Sectarianism and The Financial Crisis. *Il Politico*, 252(1), 24–42. <https://doi.org/10.4081/ilpolitico.2020.295>
- Meier, D. (2014). Lebanon: The Refugee Issue and the Threat of a Sectarian Confrontation. *Oriente Moderno*, 94(2), 382–401. <https://doi.org/10.1163/22138617-12340063>
- Ministry of Finance Lebanon. (2008). *Loan Agreement between Lebanon and France*. <https://finance.gov.lb/en-US/finance/PublicDebt/DebtT/Documents/Note%20on%20agreement%20with%20France.pdf>

- Mouawad, J. (2017). Unpacking Lebanon's Resilience: Undermining State Institutions and Consolidating the System? *Istituto Affari Internazionali (IAI)*. <http://www.jstor.com/stable/resrep17538>
- Nainggolan, P. P. (2020). *Konflik Internal dan Kompleksitas Proxy War di Timur Tengah* (1st ed.). Buku Obor.
- Rabil, R. (2021). Lebanon-Turkey Relations: Reclaiming the "Sword" and "Crescent" of Islam. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 15(1), 84–107. <https://doi.org/10.1080/25765949.2021.1886512>
- Rusdiyanta. (2022). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (1st ed.). Rajawali Press.
- Salamey, I. (2014). *The government and politics of Lebanon*. Routledge.
- Salloukh, B. F. (2024). The State of Consociationalism in Lebanon. *Nationalism and Ethnic Politics*, 30(1), 8–27. <https://doi.org/10.1080/13537113.2023.2187970>
- Saouli, A. (2024). Identity, Anxiety, and War—حزب الله ومأساة غزة. *Al-Muntaqa: New Perspectives on Arab Studies*, 7(January/February 2024,), 99–114.
- Tashjian, Y. (2021). *The Great Game in the Levant: Russia's Interests in Lebanon*. American University of Beirut. <https://www.aub.edu.lb/ifi/Pages/arab-and-international-affairs/russias-interests-in-lebanon-analysis.aspx>
- Thebian, A. (2020). Corruption, Protest, and Hope in Lebanon. *Journal of International Affairs*, Spring/Summer 2020, 73. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26939980>
- Uliyah, T. (2021). *Kepemimpinan Kerajaan Turki Utsmani: Kemajuan dan Kemundurannya*. 7(2).
- Vaughan, K. (2018). Who Benefits from Consociationalism? Religious Disparities in Lebanon's Political System. *Religions*, 9(2), 51. <https://doi.org/10.3390/rel9020051>
- Yakoubi, M. (2022). The French, the British and their Middle Eastern Mandates (1918-1939): Two Political Strategies. *Revue Française de Civilisation Britannique*, XXVII(1). <https://doi.org/10.4000/rfcb.8787>
- Young, W., Stebbins, D., Frederick, B. A., & Al-Shahery, O. (2014). Spillover of the Syrian Conflict into Lebanon. In *Spillover from the Conflict in Syria* (pp. 25–34). RAND Corporation. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1287mhx.11>

BIOGRAFI

Laila Rizky Amaliya Mahasiswa Universitas Indonesia peminatan Timur Tengah dalam studi Hubungan Internasional.

Mulawarman Hannase Associate Professor dan staf pengajar Universitas Indonesia peminatan Timur Tengah dalam studi Hubungan Internasional.

Nashiha Ulya Mahasiswa Universitas Indonesia peminatan Timur Tengah dalam studi Hubungan Internasional.

Khoirunnisa Mahasiswa Universitas Indonesia peminatan Timur Tengah dalam studi Hubungan Internasional.

Tobroni Muhammad Mahasiswa Universitas Indonesia peminatan Timur Tengah dalam studi Hubungan Internasional